

Bisakah Negara Teokratis Terbentuk di Mindanao?

ACO MANAFE

Suatu negara teokrasi dengan basis perjuangan kaum minoritas Muslim Moro di Mindanao sejak tiga dekade, telah menjadi obsesi dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Perjuangan bangsa Moro yang sejak penjajahan Spanyol (abad ke-15-16) kembali mengemuka setelah Amerika Serikat memerdekakan Filipina. Di paroh abad ke-20 ketika Manila dianggap berpihak dan mendukung penguasaan tanah bangsa Moro oleh pemukim-pemukim baru dari utara dan sekitar Mindanao, kecemasan bangsa Moro menjadi semakin meningkat.

Dan kini setelah 29 tahun Peretujuan Tripoli (23 Desember 1976) dan hampir satu dekade Pengakuan Perdamaian 1996-1998 dengan prakarsa Jakarta, konflik politik dan militer Manila-Moro tetap berlangsung. Jika Kesepakatan Tripoli diprakarsai oleh Libya dan OIC-Organization of Islamic Conference-atau OKI), serta Inisiatif Jakarta didukung oleh Indonesia bersama Organisasi Konferensi Islam (OKI), maka mulai tahun 2000, prakarsa perdamaian diambil alih oleh Malaysia.

Untuk mendalami konflik etnis Moro dengan Pemerintah Manila, kita perlu memahami beberapa inisiatif perdamaian yang dilancarkan sejak mendiang Presiden Ferdinand Marcos, Presiden Cory Aquino, dan Presiden Fidel Ramos. Penulis tidak memasukkan Presiden Joseph Estrada, karena pada

tahun 2000, Estrada menolak gencatan senjata yang diajukan MILF, dan bahkan memerintahkan perang total terhadap MILF dan Abu Sayyaf.

Adalah Ferdinand Marcos yang memprakarsai wilayah otonom untuk Mindanao, dan mengutus istrinya Nyonya Imelda menemui Pemimpin Libya Muammar Khadafi pada pertengahan tahun 1970an untuk membujuk Khadafi menjadi mediator Manila dengan Front Pembebasan Nasional Moro-MNLF-*Moro National Liberation Front*, pimpinan Nur Misuari. Berdasarkan Perjanjian Tripoli 1976, Manila memberikan otonomi kepada 13 provinsi termasuk 9 kota yang berkaitan dengan Region IX dan Region XII. Ke-13 provinsi Mindanao itu masing-masing: Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Palawan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato dan Davao del Sur.

Otonomi regional Mindanao juga diberikan kepada kota-kota di 13 provinsi tersebut. Namun setelah Persetujuan Tripoli, perundingan untuk implementasi perdamaian agak sulit dilakukan, karena perbedaan pandang dalam usul-usul Manila dan MNLF mengenai pemberian otonomi.

Marcos mengharuskan adanya referendum, sehingga memperoleh kepercayaan rakyat seluruhnya mengenai otonomi terhadap Muslim Mindanao. Plebisit itu dilakukan pada Februari 1977. Namun referendum tersebut sempat tertunda dua kali, seharusnya tanggal 21 Februari 1977, ditunda menjadi 17 Maret dan diulur lagi hingga 17 April 1977. Manila harus mendapatkan konsesi dari Muammar Khadafi, yang berperan menegakkan Persetujuan Tripoli 1976.

Perlu dicatat diplomasi Nyonya Imelda Marcos, di mana *First Lady* Filipina itu harus dua kali menemui Khadafi di Libya telah memunculkan rumor, bahwa Khadafi telah memetik gitar di bawah tenda kediamannya di gurun Tripoli, untuk mengiringi lagu yang dilantunkan Imelda. Perjalanan kedua Nyonya Marcos untuk menyukseskan otonomi Muslim Mindanao terjadi pada 10 Maret 1977. Konsultasi Imelda Marcos ini merupakan upaya terobosan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal Persetujuan Tripoli.

Sukses Nyonya Imelda antara lain terciptanya hubungan telepon Marcos-Khadafi dan Proklamasi Marcos yang diterbitkan 26 Maret 1977. Proklamasi ini mendeklarasikan otonomi seperti yang

ditentukan Persetujuan Tripoli. Presiden Marcos juga membentuk Pemerintahan Sementara (*Provisional Government*) yang diketuai oleh Ali Dimaporo dan anggotanya gubernur ke-13 provinsi) termasuk Senator Batasan, Haji Hussein Loong sebagai wakil MNLF.

Marcos menetapkan referendum 17 April 1977, meskipun entah karena apa, MNLF menolak ikut serta. Hasil plebisit ternyata menolak otonomi, karena mayoritas pemilih dari sekitar 6,7 juta jiwa, bukanlah kaum Muslim. Jumlah umat Islam Moro, hanya 3 juta orang. Dalam kondisi tersebut Marcos dengan Dekrit 1618 membentuk dua pemerintahan terpisah untuk Region IX dan Region XII yang kelak dibubarkan oleh Presiden Aquino.

ISI PERSETUJUAN TRIPOLI

Dalam perjanjian Tripoli Desember 1976, sebenarnya disebutkan kaum Muslim memiliki hak menjalankan pengadilan syariah, berhak mendirikan sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Yang menarik, otonomi berdasarkan Perjanjian Tripoli yang kelak diikuti otonomi Mindanao di masa Presiden Fidel Ramos (1996), adalah hak untuk memerintah sendiri, mengurus ekono-

mi dan sistem keuangan sendiri, serta berhak punya wakil di Pemerintah Pusat di Manila.

Provinsi-provinsi tersebut juga berhak punya pasukan keamanan, dan yang penting, memperoleh prosentase besar dari penghasilan tambang dan mineral. Samahalnya dengan provinsi-provinsi dan kota-kota Muslim di selatan juga, berhak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Regional dan Dewan Pemerintahan-Eksekutif yang ditentukan (dipilih sendiri).

Kelak pada masa pemerintahan Presiden Cory Aquino, Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (*ARMM-Autonomous Region in Muslim Mindanao*) diresmikan di Cotabato, pada tanggal 6 November 1990. Pembentukan ARMM diulangi lagi atau dipertegas oleh Presiden Jenderal Fidel Ramos pada tahun 1996 dan hal ini didasarkan pada *Republic Act* (RA) 6734 pada 8 Juni 1989, dan disahkan oleh Presiden Aquino pada tanggal 1 Agustus 1989.

Presiden Aquino dianggap tokoh Manila, yang meletakkan dasar bersejarah bagi otonomi dan hak-hak Bangsa Moro di selatan, karena bersamaan dengan peresmian ARMM, dia juga terbang ke Jolo untuk menemui pemimpin MNLF Nur

Misuari pada tanggal 2 Oktober 1989.

Adalah suatu pengorbanan bagi penduduk Mindanao yang mayoritas penduduknya Non-Muslim, yakni pemeluk Katolik (hampir 4 juta orang). Dikatakan semacam toleransi yang *fair* dan murni, karena mereka kalangan mayoritas Katolik di seluruh 13 provinsi dan 9 kota ikhlas menerima otonomi. Kepada rekan-rekan Muslim diberikan sejumlah hak termasuk menjalankan pengadilan syariah. Bangsa Moro hanya sebanyak 3 juta orang, atau beberapa persen dibanding dengan mayoritas penduduk Filipina yang berjumlah 65 juta jiwa.

MANILA SINGGUNG BERUPAYA

Manila berupaya sungguh-sungguh memproses otonomi bagi ARMM. Oleh sebab itu faktor demokrasi benar-benar diterapkan bagi kaum Muslim Mindanao, sehingga plebisit dilakukan lagi, pada 19 November 1989 di 13 provinsi dan 9 kota yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau RA 6734 itu.

Meskipun dalam kenyataannya, Komisi Pemilu (Comelec) hanya menghitung suara di 4 provinsi, yakni Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi Tawi. Per-

setujuan Tripoli dan berbagai aturan perundang-undangan yang mengikutinya, menunjukkan bahwa upaya Manila menyelesaikan masalah Moro dan Muslim Mindanao dilakukan seefektif mungkin. Ada suatu ketetapan lain, yakni Pemerintah Nasional dalam akselerasi ARMM selama 10 tahun harus menyumbang kepada ARMM setiap tahun 10 juta peso.

Presiden Cory Aquino berupaya terus mencairkan kebekuan hubungan, karena konflik bersenjata terus berjalan dengan gerilyawan MNLF pimpinan Panglima Nur Misuari. Langkah Cory antara lain menunjuk iparnya Butz Aquino, sebagai utusan pribadi presiden dalam perundingan-perundingan dengan MNLF dan Nur Misuari di Jolo. Aquino juga menunjuk Menteri Urusan Nasional (Mendagri) Aquilino Pimentel sebagai ketua tim pemerintah untuk berunding dengan MNLF. Pimentel dibantu Butz Aquino dan Norberto Gonzales, penasihat keamanan nasional.

Hasil yang nyata dari Tim Pimentel adalah pertemuan dengan mediator Arab Saudi pada 2-3 Januari 1987 untuk menyelesaikan otonomi Moro yang dikenal dengan Kesepakatan Jeddah (*Jeddah Accord*). Kesepakatan Jeddah ini ditandatangani oleh tiga tokoh, yakni

Mendagri Pimentel, Nur Misuari, dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Syed Sharifuddin Prizada.

Kedua pihak Manila dan MNLF sepakat melanjutkan perundingan pemberian otonomi bagi Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi Tawi dan Palawan.

Pernyataan bersama *Jeddah Accord* itu berbunyi: Pada saat ini Panel MNLF mengusulkan, agar Presiden Aquino mengeluarkan perintah menghentikan aturan sementara dalam draf konstitusi, bagi pemberian otonomi kepada Muslim Mindanao dengan jadwal melakukan referendum 2 Februari 1987, untuk melihat keinginan rakyat Mindanao dan kepulauannya. Sedangkan panel pemerintah Filipina harus menyerahkan usul ini agar disetujui Presiden Aquino.

Dalam perkembangannya MNLF melalui Nur Misuari mengajukan 26 usul kepada Manila, dengan ancaman akan kembali bergerilya, bila usul-usul 26 pasal itu ditolak pemerintah. Nur Misuari kemudian menulis surat kepada Presiden Aquino, bahwa militer Filipina AFP *Armed Forces of the Philippines* telah memulai perang dengan gerilyawan MNLF. Aquino memerintah meneliti kebenaran surat Misuari melalui Menteri PU Vicente Jayme. Aquino

kemudian mengganti ketua tim pemerintah Pimentel pada tanggal 26 Februari 1987, dengan Dubes Filipina di PBB Emmanuel Palaez. Pimentel pada waktu memimpin tim pemerintah ke Jeddah, dianggap gagal memenuhi hasrat para penasihat Cory di Istana Malacanang. Pimentel dianggap terlalu kekiri-kirian sehingga sulit mempertahankan kepentingan pemerintah. MNLF pernah mengklaim bahwa Pimentel menjanjikan otonomi khusus bagi Mindanao, Sulu dan Palawan, meskipun Pimentel membantah klaim tersebut. Namun secara umum pergantian ini dianggap sebagai strategi Manila, yang tidak seberapa berubah dari strategi Marcos dalam menghadapi masalah Moro di selatan.

Namun, Dubes Palaez ternyata bergerak lincah sebagai seorang diplomat senior. Di masa jabatannya sebagai ketua tim Manila Palaez menghubungi Kuala Lumpur dan Jakarta, untuk meminta nasihat dan masukan. Dalam dokumen intelijen dan diplomasi Manila tercatat kunjungan diplomasi Palaez yang cukup signifikan ke Malaysia dan Indonesia, termasuk ke OKI, untuk mengegolkan otonomi Muslim Mindanao. Palaez juga ke Singapura pada 15 Mei 1987, menjelaskan posisi Manila dalam pemberian otonomi tersebut kepada negara-negara ASEAN dan Sekjen

OKI Syed Sharifuddin Pirzada.

Dalam konteks protes MNLF, bahwa militer melancarkan perang, Panel Pemerintah lalu menyurati Nur Misuari tanggal 9 April 1987, menjawab keinginan MNLF dan keinginan Manila membentuk Dewan Persiapan Otonomi. Tim Pemerintah pada 20 April 1987 meminta Aquino menyetujui pembentukan Dewan Pemerintahan Sementara di Mindanao. Inilah cikal bakal ARMM-*Autonomous Region for Muslim Mindanao*, yang dirintis Aquino dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan-penetapan perwujudannya oleh Presiden Fidel Ramos.

Manila pada pertengahan April 1998 menunjuk Nur Misuari sebagai Gubernur ARMM pertama.

Inilah sebagian ringkasan untuk sedikit memahami masalah Moro dan Muslim Mindanao, jadi bukan setelah Inisiatif Perdamaian Jakarta saja, namun masalah Moro dan Mindanao sudah dirundingkan, sejak awal konflik tahun 1976.

Prosesnya melamban atau maju mundur, karena berbagai perkembangan politik di kalangan MNLF sendiri, terutama setelah MNLF terpecah dengan munculnya organisasi atau gerakan

yang lebih agamis, yakni MILF atau Front Pembebasan Islam Mindanao, pimpinan Hashim Salamat.

Maka Cory Aquino terpaksa membentuk badan penyelamat *ad hoc commission*, yang disebut Komisi Konsultasi Regional atau *Regional Consultative Commission* (RCC) yang beranggotakan 50 orang. Aquino sendiri yang mewawancarai mereka untuk mengetahui wawasan, kemampuan dan aspirasi mereka mengenai masalah Bangsamoro, yang dipicu oleh Front Pembebasan Nasional Moro-MNLF pimpinan Nur Misuari.

MILF DAN ABU SAYYAF

Perundingan Manila-Moro dengan mediator Kuala Lumpur berjalan tersendat, sementara kekerasan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dan sempalannya kelompok teroris Abu Sayyaf, tetap menegang. Masalahnya perlawanan bersenjata separatis Moro, justru dibalas dengan keras oleh operasi-operasi militer Pemerintah Filipina. Manila menganggap sebagai republik dan negara kesatuan yang berdaulat, mustahil ada gerakan separatis Moro untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri.

Konflik di Filipina Selatan itu, berjalan dengan cukup agresif, dan depresif sehingga, membahayakan persatuan kebangsaan Filipina dan merepotkan Manila, dari aspek kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Data-data militer dan intelijen menunjukkan, selama hampir 30 tahun konflik Manila-Moro, terdapat 120 ribu orang yang tewas atau menjadi korban.

Kelompok Abu Sayyaf, adalah sempalan Front Kemerdekaan Islam Moro-MILF yang melakukan terorisme di Kepulauan Jolo, sementara MILF dan Front Kemerdekaan Nasional Moro – MNLF memperjuangkan kemerdekaan Moro dengan basis minoritas Islam, dan ideologi kebangsaan.

MENGUBAH CITRA KEBANGSAAN

Di samping kedua organisasi yang berasaskan kebangsaan dan Islam moderat ada organisasi sempalan, Abu Sayyaf, dan Pentagon yang terungkap pada bulan Mei 2004. Badan Intelijen Filipina dan Dewan Keamanan Nasional pimpinan Norberto Gonzales berhasil pula mengungkapkan, kelompok Islam Rajah Soleiman, yang dipimpin Wally Villanueva, dan tertangkap Mei 2005 yl.

Ketiga kelompok militan dengan tindakan brutal dan kekerasan ini telah mengubah citra kebangsaan dan nasionalisme Moro pimpinan Nur Misuari dan mendiang Hashim Salamat.

Selain itu unsur-unsur sempalan dan radikalisme Timur Tengah, bahkan gaya terorisme Al Qaeda menjadi inspirasi dan dasar perjuangan bagi kelompok sempalan Abu Sayyaf, Pentagon dan Rajah Soleiman.

Semula jaringan gerilya bangsa Moro mengirim para kadernya, berlatih militer dan perang gerilya di Libya, kemudian sebagai pasukan Mujahidin di Afghanistan. Mujahidin Afghanistan dibentuk untuk melawan Tentara penduduk-an Uni Soviet pada tahun 1980an. Namun dalam perkembangannya, karena jaringan Al Qaeda memperluas pengaruh dengan dana dan perekrutan kaum militan setempat, maka gerakan-gerakan Moro juga semakin terpengaruh.

Bahkan jaringan Abu Sayyaf diduga kuat berhubungan dengan organisasi Jemaah Islamiyah, termasuk dengan kalangan ekstrimis Indonesia. Tertangkapnya Fatur Rahman Al-Ghosi asal Madiun (tahun 2003) yang pernah bermitra dengan Dr Azahari maupun pengakuan

beberapa orang Indonesia yang tertangkap pasukan keamanan dan intelijen Filipina (2003-2005), memberikan bukti kuat tentang keterkaitan kaum militan Moro dengan Al Qaeda, JI dan kelompok militan tertentu di Indonesia.

Ada pula Taufik Rifki (sebutan Filipina Taufek Refke), yang pernah ditampilkan oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo, pada akhir Oktober 2003.

Komisaris Biro Imigrasi Andrea Domingo beberapa hari setelah langkah Arroyo mengumumkan suksesnya penangkapan atas dua tersangka Al Qaeda berkebangsaan Arab.

Salah satunya adalah pria berusia 36 tahun asal Yordania, bernama Mahmoud Afif Abdeljalil, ditangkap 25 September 2003, di kota selatan Zamboanga, ketika dia menawarkan penjualan 14 properti milik Alice Yabo, istri kedua Mohammed Jamal Khalifa.

Mohammed Jamal Khalifa adalah ipar tokoh teroris dan pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden. Ipar bin Laden ini memiliki beberapa yayasan kemanusiaan di Filipina, dan Khalifa terpaksa dilarang masuk ke Filipina pada, tahun 1994. Larangan ini dilakukan, setelah Pemerintah Manila menuduh Khalifa

mendanai beberapa kelompok militan, serta diduga kuat terlibat dalam rencana pengeboman pesawat-pesawat 12 maskapai penerbangan di kawasan Pasifik.

Pria asal Yordania Abdeljalil diduga kuat sebagai kaki tangan Khalifa, ipar Osama bin Laden.

Dalam perkembangan tahun 2002, Abu Sayyaf (bahasa Arab berarti Si Pembawa Pedang) lebih mirip geng atau mafia kejahatan, karena sering menculik, menyandera dan kemudian meminta uang tebusan.

Dalam catatan CIA-Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat tahun 2002, Abu Sayyaf meraih uang tebusan dari misionaris Amerika, turis asing dan juga sandera lokal sekitar 10 juta hingga 750 juta dolar. Dana ini digunakan untuk membeli persenjataan, bahkan ada yang digunakan untuk membayar pejabat lokal atau tokoh-tokoh yang disusupkan, atau tentara disertir yang bersimpati kepada mereka.

Mengingat MILF dan Abu Sayyaf semakin garang, Presiden Arroyo Macapagal mengundang masuknya sekitar 160 pasukan komando AS bersama 500 pasukan pendukungnya untuk melatih

militer Filipina melawan terorisme Abu Sayyaf dan MILF. Abu Sayyaf yang militan hanya mempunyai pasukan sekitar 800 orang, sementara jumlah gerilyawan MILF sekitar 10 ribu hingga 12 ribu orang.

Di sisi lain 15.000 pasukan MNLF pimpinan Prof Nur Misuari, sejak Perjanjian Damai 1996, sudah banyak yang beritengrasi dengan militer Filipina melalui proses pengampunan dan pelatihan. Posisi pasukan khusus Amerika hanya sebagai pendamping dan dilarang ikut bertempur, karena dibatasi oleh konstitusi Filipina.

KONTROVERSI 1968

Masalah Moro dalam Filipina Modern, harus dilihat pada kontroversi tahun 1968, ketika kedua pihak Manila dan para pemimpin Moro mengakui, bahwa ada gesekan-gesekan politik dan sosial budaya termasuk ekonomi (penguasaan tanah oleh para pemukim baru) terhadap posisi bangsa Moro.

Ketika ada operasi militer besar-besaran khususnya di Pulau Corrigedor, di mana banyak penduduk sipil Moro terbunuh, maka tokoh pejuang Moro Datu Udtog Matalam dari Cotabato

mendirikan Gerakan Kemerdekaan Mindanao. Gerakan yang merupakan cikal bakal *Moro National Liberation Front* (MNLF), ini terbentuk hanya dua bulan setelah Insiden Corrigedor. Para tokoh Moro tetap bersikeras bahwa insiden di atas, sebagai pembunuhan massal para milisi Moro di Pulau Corrigedor.

MNLF pimpinan Nur Misuari, yang kemudian sebagai profesor politik di University of Philippines, mendirikan Kelompok 90 atau *Batch 90*. Kelompok ini mengirim 90 tenaga paramiliter untuk berlatih di Libya dan tempat-tempat lainnya di Timur Tengah (termasuk Asia Tengah-Afghanistan).

Secara umum, dalam konteks Moro, bisa dikelompokkan 4 satuan perjuangan gerilya yang seluruhnya bergerak di provinsi-provinsi selatan Mindanao. Mereka adalah MNLF pimpinan Nur Misuari, MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) pimpinan Hashim Salamat (kini digantikan oleh Murad), Abu Sayyaf pimpinan Janjan Jailani dan Pentagon, sebuah geng yang sering menculik, menyandera dan meminta uang tebusan kepada pihak asing, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di luar itu tercatat: *The People's Army-Tentara Rakyat Baru* bentukan Partai Komunis Filipina, ang ber-

jumlah sekitar 5.000 orang.

Pada pertengahan tahun 2005, muncul kelompok baru yang berasal dari utara Filipina. Menurut data intelijen dan Kantor Keamanan Nasional Filipina, organisasi baru ini merancang bahkan melancarkan beberapa serangan bom di Ibukota Manila.

Organisasi ini menggunakan nama Rajah Soleiman nama raja Islam terakhir, sebelum masuknya penjajahan Spanyol di abad ke-15. Para tokohnya kebanyakan para pemuda Katolik yang tadinya bekerja di Timur Tengah, yang kemudian masuk Islam. Dan oleh karena para tokoh kelompok keras Rajah Soleiman tetap menggunakan nama Katolik mereka, seperti Santos, Federico, Ramos dan lainnya maka agak sulit mengidentifikasi para teroris tersebut.

Sebenarnya Manila bisa mencapai perdamaian jangka panjang, setelah Jakarta dan OKI dapat membujuk Nur Misuari untuk berdamai. Imbalan perdamaian dengan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pimpinan Misuari, adalah pemberian otonomi penuh kepada empat atau lima provinsi selatan Mindanao. Ketika terjadi Perdamaian 1996, ada empat provinsi Muslim Mindanao, yakni Lanao del Sur, Magu-

indanao, Sulu dan Tawi-Tawi. Sesungguhnya Nur Misuari sudah bahagia dengan kedudukannya sebagai Gubernur ARMM (*Autonomous Region of Muslim Mindanao*) yang diresmikan oleh Presiden Ramos pada April tahun 1996.

PENDAPAT NUR MISUARI

Dalam wawancara dan percakapan panjangnya dengan penulis di suatu malam bulan April 1998 di Ibukota Davao, pemimpin gerilya Moro dan profesor University of Philippines ini menjamin, bahwa tak akan ada suatu negara teokrasi (Islam) di akhir abad ke-20 yang sudah modern ini.

"Saya kira sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman, untuk mendirikan sebuah negara Islam di Mindanao, bagi bangsa Moro dengan alasan apa pun!" Demikian pernyataan Nur Misuari yang besoknya pada peresmian Provinsi Otonomi Muslim Mindanao, dia dikalungi bunga dan disalami Presiden Ramos, Walikota Mindanao dan beberapa senator. Presiden Ramos dan orang-orang penting Manila ini juga disertai pimpinan Bank Islam Timur Tengah, dan mereka juga menghadiri peresmian pemerintahan otonomi Islam Mindanao, serta pelantikan Nur Misuari sebagai

Gubernur pertama ARMM.

Dia melukiskan wilayah Mindanao yang subur dan kaya akan bahan tambang emas, tembaga dan migas yang belum digali. Dia juga mengajak investor Indonesia untuk menanam modal di Mindanao. Dan saat itu muncul pengusaha muda Robby Sumendap yang dengan dukungan MNLF dan ARMM berniat mendirikan pabrik petrokimia di Mindanao dengan investasi sekitar 3 miliar dolar.

Namun itulah romantika seorang Nur Misuari, pemimpin gerilya, profesor, politisi dan pejabat pemerintahan. Meskipun tidak seluruhnya dia bersalah, ketika muncul Presiden Joseph Estrada, yang tidak begitu menyukai Misuari, sehingga pada pemilihan umum 2001 untuk pergantian Gubernur ARMM, Misuari tersingkir.

Memang ada tuduhan, bahwa Nur Misuari terlalu menikmati privilese ke gubernurannya, banyak melakukan perjalanan dinas dan sering menginap di hotel berbintang lima, yang nota bene memboros anggaran. Maka dengan sikap-sikap praktis demikian, dia semakin jauh dari rakyat yang harus diayomi dan dilindunginya.

Nur Misuari digantikan oleh Parouk Hussin, mantan Menlu MNLF.

Nur Misuari kembali menggalang sisa-sisa kekuatan MNLF dan dengan 600 gerilya bersenjata mereka menyerang pos-pos militer dan polisi. Insiden serangan 13 November 2001 di Pulau Jolo menewaskan 131 orang. Nur Misuari berhasil melarikan diri ke Sabah, tempat migrasi banyak orang Moro-Filipina. Namun beberapa pekan kemudian dia tertangkap polisi Malaysia dan diekstradisi ke Manila untuk diadili dan dihukum.

ERA BANTUAN AMERIKA

Perkembangan politik di dalam dan luar negeri juga berpengaruh terhadap perjuangan MNLF, MILF, kelompok Abu Sayyaf dan kelompok teroris baru Raja Soleiman yang bergerak di Pulau-pulau Luzon dan Filipina Tengah. Pasukan teroris Raja Soleiman yang cukup punya nama belakang ini, bergerak justru di utara Filipina, khususnya di Manila. Memang ada Tentara Rakyat Baru bentukan komunis, namun pikiran, tenaga dan dana banyak terkuras untuk mengatasi gerakan separatisme Islam di Mindanao.

Gloria Macapagal Arroyo, yang muncul pada tahun 2001, setelah Estrada ditumbangkan, tidak bisa sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengatasi kemelut Moro. Sementara di luar negeri, serangan teroris 11 September 2001, membuat Presiden George W Bush mengajak bangsa-bangsa Asia khususnya Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Indonesia dan Filipina untuk bersama memerangi terorisme.

Puluhan pemuda militan Indonesia yang dikirim ke Mindanao untuk berlatih perang gerilya, dan belajar membuat bom, senjata rakitan, serangan bunuh diri, terus diburu bersama rekan-rekan mereka bangsa Moro.

Ketika Fatur Rohman al-Ghosi yang ditangkap intelijen Filipina di tahun 2003, karena terbukti menyimpan 1 ton bahan peledak untuk "pesta bom" di Manila dan sekitarnya, Presiden Bush menawarkan bantuan militer, kepada Manila.

Bantuan tersebut meliputi tiga hal utama:

Pertama, Washington dan Pentagon mengirim 1.000 pasukan, dengan inti pasukan komando anti-teroris untuk melatih Tentara Filipina melakukan

perang melawan terorisme, khususnya di Mindanao.

Kedua, memberikan perlengkapan militer yang lebih modern, mulai dari persenjataan, peralatan pantau hingga helikopter serbu.

Ketiga, mendampingi (meskipun tidak bertempur, karena dilarang konstitusi Filipina) militer Filipina, menghadapi kelompok teroris di provinsi-provinsi Moro khususnya di Sulu, Basilan, Tawitawi dan Jolo.

Khusus mengenai terminologi "mendampingi" ini, muncul kritik tajam dari kalangan oposisi, yang mengatakan ini hanya istilah yang melunakkan campur tangan dan intervensi Amerika dalam sistem pertahanan domestik, negeri bekas koloni AS itu.

Karena "permusuhan politik" yang keras, maka pada tahun 1992, AS menutup dua pangkalan utamanya di Filipina, terutama Pangkalan AL-nya di Subic Bay, Pulau Luzon. Sejak itu pemasukan pertahanan sekitar 200 juta dolar per tahun, merosot tajam.

Kini dalam melawan terorisme di selatan, Washington membantu militer Filipina pada tahun 2004 sebesar 86 juta

dolar, naik 21 persen ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Dalam catatan pada tahun 2001 Pentagon hanya memberikan bantuan militer 38 juta dolar, maka pada tahun 2003 angka itu melonjak tiga kali menjadi 114 juta dolar, sehingga Filipina menjadi penerima keempat terbesar bantuan militer AS. Presiden George W Bush malahan pada akhir Oktober 2003 berjanji memberikan dana yang lebih besar, yakni 389 juta dolar, apabila tercapai pakta perdamaian antara Manila dengan separatis Moro, khususnya dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Secara implikatif bantuan Washington juga akan mengalir ke etnis minoritas Moro, yang selama ini merasa terabaikan hak-haknya sebagai minoritas.

Etnis Moro atau Bangsa Moro, selama ini merasa dianaktirikan dalam pendidikan, kesehatan, hak-hak sosial ekonomi, seperti memperoleh lapangan kerja dan hak-hak politik untuk ikut menentukan kiprah bangsa Filipina. Ini merupakan hal-hal fenomenal bagi etnis, atau golongan minoritas manapun di dunia. Hanya demokrasi yang menjanjikan persamaan, egalitarian, keadilan dan kehormatan yang setara, yang dapat mengangkat Bangsa Moro, meskipun tidak harus menempuh jalan pe-

misahan atau separatisme dari induknya. Manila menyadari hal itu, meskipun konstitusi nasional tidak mungkin menyediakan otonomi khusus yang berlebihan, dan sebaliknya pengabain yang ekstrem bagi Moro dan Muslim Mindanao akan selalu menimbulkan konflik dan petaka yang terus berlanjut.

Di bidang persenjataan, Pentagon melalui komitmen Bush-Arroyo, menyuplai Manila dengan 45 ribu senapan serbu M-16 sejak tahun 2001, 333 truk militer besar, lima helikopter Huey, beberapa kapal patroli pantai, dan sebuah pesawat angkut C-130 Hercules. Pada kunjungannya ke Manila akhir Oktober 2003, Presiden AS justru menjanjikan bantuan 20 helikopter militer lagi.

WACANA YANG SULIT DIWUJUDKAN

Ada dua hal yang tentu memusingkan Manila termasuk negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. *Pertama*, perjuangan panjang Bangsa Moro dengan asas etnis dan kebangsaannya untuk membentuk Moro Merdeka, akan selalu menimbulkan gesekan-gesekan politik dan militer dengan tetangga seperti Malaysia dan Indonesia.

Kedua, pengacauan kelompok sempalan Moro Islamic Liberation Front, seperti Abu Sayyaf, dan Rajah Soleiman (dan Pentagon-sengaja memilih nama pusat militer AS), cenderung menggunakan aksi-aksi kekerasan dan terror untuk mengacaukan situasi.

Bukan tidak mungkin bila Manila terlalu lunak menghadapi gerakan separatis Moro, maka akan terbentuk sebuah negara teokratis mini dengan penduduk 3 juta jiwa di Mindanao. Tokoh-tokoh moderat seperti Nur Misuari dari MNLF, mendiang Hashim Selamat, dan kini Murad sudah kehilangan pamor, akan tergantikan oleh kaum muda yang radikal.

MILF sendiri secara samar-samar, bila mengacu Persetujuan Tripoli Desember 1976 dan *Jeddah Accord* Januari 1977, jelas menginginkan secara legal, untuk menerapkan suatu negara teokrasi. Bukankah unsur-unsur agama itu diabsahkan bagi kepentingan hukum, sosial, keagamaan Bangsa Moro, karena dijamin atau diratifikasikan oleh sebagian pasal UU Otonomi dan plebisit yang dilakukan oleh Presiden Marcos, Presiden Aquino, dan Presiden Fidel Ramos. Kalau kemudian itu dianggap internal dalam konteks pemerintahan khusus ARMM, maka dasarnya pun bisa

diartikan sepihak oleh kaum sempalan.

Sangat disayangkan Nur Misuari yang seharusnya menjadi panutan bagi bangsa Moro dan etnis minoritas di Mindanao, terjungkal dan tersingkirkan oleh saingannya mantan Menlu MNLF Parouk Hussin, pada tahun 2001.

Nur Misuari adalah *the outgoing leader* yang keburu mapan ketika menikmati jabatan sebagai Gubernur ARMM (1998-2001), dianggap hidup mapan dari hotel ke hotel mewah, serta semakin menjauh dari rakyat Moro dan para mitra seperjuangannya.

Presiden Arroyo pada tanggal 11 Agustus 2005, menetapkan Gubernur baru ARMM Zaldy Ampatuan, seorang yunior MNLF menggantikan Parouk Hussin. Gubernur Zaldy Ampatuan mungkin menjadi harapan Manila dan Presiden Arroyo, agar Moro tidak terlalu jauh menyimpang dari konsitusi nasional, tidak melanggar kesepakatan persatuan Filipina, yang berarti "tetap tunduk" kepada konstitusi nasional, dan menjaga keutuhan bangsa.

Kini Manila juga masih berharap Murad pemimpin MILF bisa menerima kesepakatan baru, dengan mediasi Kuala Lumpur. Sementara ini perundingan

damai terus terhambat oleh kondisi politik dan posisi Arroyo yang digoyang kalangan oposisi, yang sebagian merupakan pendukung mantan Presiden Estrada. Situasi juga dikacaukan oleh serangan-serangan teroris Abu Sayyaf, militan Pentagon, kelompok keras baru Rajah Soleiman dan Tentara Komunis *New People's Army*.

demikian apakah mungkin sebuah negara teokratis dapat terbentuk di Mindanao? Banyak pengamat menilai hal tersebut hanya merupakan politisasi kaum militan untuk tujuan kekuasaan, bukan murni aspirasi yang mendasar.

Di era Filipina yang modern dan demokratis, negara teokratis tersebut lebih merupakan wacana politis yang sulit diwujudkan. □

Maka di dalam situasi dan kondisi

